HIKMAH IDUL ADHA BAGI PELAYANAN PUBLIK: REFLEKSI PENGABDIAN DALAM PERSPEKTIF OMBUDSMAN

Rabu, 03 Juni 2026 - Nurul Istiamuji

Hari Raya Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan yang identik dengan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pengabdian, keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pelayanan publik, semangat Idul Adha dapat menjadi refleksi penting bagi aparatur negara agar menjalankan tugas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan.

Nilai Pengorbanan dalam Pelayanan Publik

Kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS mengajarkan arti ketaatan dan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Nilai ini sangat relevan bagi para penyelenggara pelayanan publik. Aparatur negara dituntut untuk mengorbankan ego, kepentingan pribadi, serta praktik-praktik yang merugikan masyarakat demi menghadirkan pelayanan yang cepat, adil, transparan, dan manusiawi.

Sayangnya, realitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga tidak memberikan pelayanan secara layak. Dalam semangat Idul Adha, aparatur publik seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengorbanan waktu, tenaga, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan tulus merupakan bentuk "kurban sosial" yang sangat dibutuhkan saat ini.

Keikhlasan sebagai Fondasi Pelayanan

Idul Adha juga mengajarkan tentang keikhlasan. Dalam pelayanan publik, keikhlasan tercermin melalui sikap melayani tanpa diskriminasi, tanpa pamrih, dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Pelayanan yang diberikan dengan ketulusan akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, pelayanan yang diwarnai pungutan liar, birokrasi berbelit, serta penyalahgunaan jabatan hanya akan memperbesar jarak antara rakyat dan negara.

Di sinilah peran Ombudsman Republik Indonesia menjadi sangat penting. Ombudsman hadir sebagai lembaga pengawas yang memastikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik tetap terlindungi. Ombudsman juga berfungsi mencegah serta menindak berbagai bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kurban dan Kepedulian Sosial

Distribusi daging kurban dalam Idul Adha mengandung pesan kuat tentang pemerataan dan kepedulian sosial. Nilai ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang harus menjamin keadilan akses bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun wilayah.

Pelayanan publik sejatinya bukan hanya tentang administrasi, tetapi tentang menghadirkan keadilan sosial. Ketika masyarakat miskin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, atau bantuan sosial, maka negara belum sepenuhnya menjalankan amanah pelayanan publik.

Ombudsman menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengadukan pelayanan publik yang tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik harus dibangun dengan semangat partisipasi dan kepedulian terhadap kebutuhan rakyat.

Idul Adha dan Reformasi Birokrasi

Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat pentingnya reformasi birokrasi berbasis moralitas. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui digitalisasi atau perubahan regulasi, tetapi juga membutuhkan perubahan mental dan budaya kerja aparatur.

Semangat pengabdian harus menjadi ruh pelayanan publik. Aparatur negara perlu memahami bahwa jabatan bukan alat kekuasaan, melainkan sarana pengabdian kepada masyarakat. Ketika pelayanan publik dilakukan dengan integritas dan empati, maka kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat.

Refleksi Idul Adha terhadap Reformasi Pelayanan Publik

Momentum Idul Adha seharusnya tidak berhenti pada seremoni keagamaan semata, tetapi menjadi refleksi moral dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Terdapat beberapa refleksi penting yang dapat diambil.

Pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendahulukan perintah Tuhan di atas kepentingan pribadi, aparatur pelayanan publik juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Pelayanan publik yang baik menuntut aparatur untuk meninggalkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti pungutan liar, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Kedua, menghilangkan mentalitas dilayani. Masih terdapat aparatur yang memandang masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan bantuan sehingga harus mengikuti kehendak birokrasi. Padahal sejatinya aparatur adalah pelayan masyarakat. Semangat Idul Adha mengajarkan kerendahan hati dan pengabdian. Aparatur negara harus membangun budaya melayani, bukan dilayani.

Ketiga, membangun empati terhadap keluhan masyarakat. Distribusi kurban mengandung pesan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dalam pelayanan publik, empati menjadi unsur penting agar aparatur memahami kesulitan masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus pelayanan sering kali berada dalam situasi mendesak, bingung, atau membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, pendekatan humanis sangat diperlukan.

Keempat, mendorong integritas dan anti-maladministrasi. Pengorbanan dalam Idul Adha juga dapat dimaknai sebagai upaya mengorbankan sifat-sifat buruk seperti keserakahan, egoisme, dan penyalahgunaan jabatan. Maladministrasi merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, aparatur pelayanan harus membangun integritas dan komitmen terhadap pelayanan yang bersih.

Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan dan keikhlasan bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga nilai kehidupan yang harus diwujudkan dalam praktik sosial, termasuk pelayanan publik. Aparatur negara perlu menjadikan momentum ini sebagai refleksi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan pelayanan publik di Indonesia semakin bersih dari maladministrasi dan semakin berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal memenuhi prosedur, tetapi tentang menghadirkan keadilan, kepedulian, dan kemanusiaan. Itulah salah satu hikmah terbesar Idul Adha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu diamalkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.